

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022-2023

Oleh : Maria Laura Febriani Sidabutar

Pembimbing: Drs. H. Ishak, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Pengendalian inflasi daerah merupakan salah satu tantangan utama dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya di Provinsi Riau yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *Collaborative Governance* dalam pengendalian inflasi daerah Provinsi Riau pada periode 2022-2023. *Collaborative Governance* melibatkan kerjasama lintas sektor antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, pelaku usaha, akademi, dan masyarakat dalam menyusun kebijakan dan strategi yang efektif untuk mengatasi inflasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk mendapatkan data atas penemuan berdasarkan kebutuhan penelitian. Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk dapat mencari sebuah informasi dari suatu fenomena yang terjadi dan diteliti yaitu *Collaborative Governance* Dalam Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Riau Tahun 2022-2023

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan dan faktor-faktor pendukung *Collaborative Governance* dalam mengendalikan inflasi Daerah Provinsi Riau tahun 2022-2023. Dalam konteks ini, penelitian berfokus pada mekanisme koordinasi antar stakeholder, efektivitas program yang dijalankan, serta kontribusi setiap pihak dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi pengendalian inflasi. Selain itu, penelitian juga mengeksplorasi faktor-faktor pendukung seperti komitmen bersama, keterlibatan aktif semua pihak, serta kapasitas kelembagaan yang memungkinkan pelaksanaan kebijakan berjalan efektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Collaborative Governance* berhasil menurunkan angka inflasi daerah menjadi 1,96%. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa elemen utama, yaitu kepemimpinan fasilitatif yang efektif, desain kelembagaan dengan aturan yang jelas melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor 1647/XI/2022, serta proses kolaborasi yang melibatkan dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen, dan pemahaman bersama yang optimal. Selain itu faktor pendukung seperti kepemimpinan yang kuat, koordinasi efektif, data dan informasi yang transparan, serta kondisi ekonomi makro yang stabil turut mendukung keberhasilan ini. Namun, penelitian ini juga menemukan keterbatasan dalam kelembagaan, di mana aktor dari sektor swasta dan masyarakat belum dilibatkan secara langsung. Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dan memperluas keterlibatan aktor untuk mendukung pengendalian inflasi yang berkelanjutan di masa mendatang.

Kata Kunci : Collaborative, Governance, Pengendalian Inflasi, Riau

ABSTRACT

Regional inflation control is one of the main challenges in maintaining economic stability, especially in Riau Province, which has a significant contribution to the national economy. This study aims to analyze Collaborative Governance in controlling regional inflation in Riau Province during the period 2022-2023. Collaborative Governance involves cross-sector cooperation between local governments, Bank Indonesia, business actors, academics, and the community in formulating effective policies and strategies to address inflation. This research uses qualitative methods with a descriptive research type to obtain data on findings based on research needs. This qualitative approach is used to seek information from a phenomenon that occurs and is studied, namely Collaborative Governance in Controlling Regional Inflation in Riau Province for the years 2022-2023. The purpose of this research is to understand the implementation and supporting factors of Collaborative Governance in controlling inflation in the Riau Province for the years 2022-2023. In this context, the research focuses on the coordination mechanisms among stakeholders, the effectiveness of the programs implemented, and the contributions of each party in formulating and implementing inflation control strategies. In addition, the research also explores supporting factors such as joint commitment, active involvement of all parties, and institutional capacity that enable the effective implementation of policies. The research results show that the implementation of Collaborative Governance successfully reduced the regional inflation rate to 1.96%. This success is supported by several key elements, namely effective facilitative leadership, institutional design with clear rules through the Riau Governor's Decree Number 1647/XI/2022, and a collaboration process involving face-to-face dialogue, trust building, commitment, and optimal mutual understanding. In addition, supporting factors such as strong leadership, effective coordination, transparent data and information, as well as a stable macroeconomic condition also contributed to this success. However, this study also found limitations in institutional aspects, where actors from the private sector and society have not been directly involved. The results of this study provide recommendations to strengthen cross-sector collaboration and expand actor engagement to support sustainable inflation control in the future.

Keywords: *Collaborative, Governance, Inflation Control, Riau*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi sangatlah penting pada suatu negara. Hal ini berkaitan dengan keberhasilan pembangunan negara atau daerah tersebut untuk menekan inflasi. Berdasarkan analisis ekonomi, ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran akan menyebabkan kenaikan harga barang. Dampak kenaikan harga tersebut dapat menyebabkan tingkat inflasi yang tinggi, dengan tingkat inflasi yang tinggi akan menggerogoti pendapatan asli masyarakat dan mengurnagi kesejahteraan masyarakat, bahkan inflasi yang sangat tinggi dapat menyebabkan peningkatan angka kemiskinan (Muh Izwar Rafiq, 2022).

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu (Suparmono, 2018). Menurut Bank Indonesia, kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan harga pada barang lainnya. Inflasi akan menyebabkan harga-harga melonjak tinggi, menurunkan daya beli masyarakat, meningkatkan suku bunga, serta meningkatkan pengangguran dan kemiskinan. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (G.A Diah Utari, 2015).

Pemerintah dalam hal ini harus menyiapkan mitigasi untuk meminimalisir dampak inflasi. Prioritas utama harus menyelamatkan rakyat agar tidak banyak yang jatuh ke jurang kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka inflasi di Indonesia meningkat pada tahun 2022 menjadi 5,51% dibanding tahun 2021 yang tercatat hanya sebesar 1,87%. Berdasarkan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2022, Provinsi Riau merupakan salah satu penyumbang angka

inflasi tertinggi dengan tingkat persennya berada di atas 5%.

Berikut data 5 Provinsi dengan angka inflasi tertinggi pada tahun 2022 :

Tabel 1.1 Data Provinsi dengan Angka Inflasi Tertinggi Per Juli 2022 (YoY)

No	Provinsi	Angka Inflasi (%)
1	Jambi	8,55
2	Sumatera Barat	8,01
3	Bangka Belitung	7,77
4	Riau	7,04
5	Aceh	6,97

Sumber : Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2022, diakses melalui YouTube Bank Indonesia

Berdasarkan tabel tersebut, Provinsi Riau mengalami kenaikan angka inflasi tertinggi yakni 7,04%. Hal itu sangat bertolak belakang dengan realita bahwa Provinsi Riau merupakan salah satu daerah yang terkenal dengan perekonomian yang sejahtera. Provinsi Riau memiliki kontribusi besar bagi devisa negara Indonesia, baik dari segi ekspor, investasi, dan lainnya. Selain itu, pada tahun 2022 Provinsi Riau berkontribusi sebesar 5,18% terhadap perekonomian nasional dan Provinsi Riau merupakan provinsi dengan PDRB terbesar kelima di Indonesia atau PDRB terbesar di luar pulau Jawa (Adelia Putri, 2023).

Angka inflasi di Provinsi Riau pada tahun 2022-2023 diklasifikasikan berdasarkan perhitungan daerah rujukan yaitu Kota Pekanbaru, Kota Tembilahan, Kota Dumai. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, pemilihan sampel kota IHK tersebut berdasarkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), pengeluaran per kapita, letak geografis, serta mempertimbangkan usulan dari BPS

provinsi, BPS kabupaten/kota dan walikota/bupati setempat. Pada tahun 2022 inflasi kota pekanbaru mencapai angka 7,34% dan turun drastis menjadi 1,83% di tahun 2023. Disusul Kota Tembilahan dari angka 6,09% menjadi 1,22%, dan Kota Dumai dari 6,01% menjadi 2,86% (Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2023)

Tingginya angka inflasi di Provinsi Riau pada tahun 2022 disebabkan oleh berbagai faktor yang saling memengaruhi. Salah satu penyebab utamanya adalah cuaca ekstrem yang memengaruhi hasil pangan, sehingga menimbulkan kenaikan harga komoditas. Selain itu, situasi geopolitik global, khususnya perang Rusia-Ukraina, turut berdampak pada perekonomian Asia Tenggara, termasuk daerah Provinsi Riau. Faktor lain yang signifikan adalah kerusakan infrastruktur jalan, yang menghambat distribusi pasokan pangan dari Sumatera Barat ke Riau, sementara permintaan masyarakat terhadap bahan pangan tetap tinggi. Kombinasi dari faktor-faktor ini memperburuk tekanan inflasi di daerah tersebut, menciptakan tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga (Sherley Wiguna Irsanti, 2024).

Pemerintah pusat bersama Bank Indonesia telah mengambil langkah strategis dalam mengelola inflasi nasional dengan membentuk TPIN (Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Nasional) pada tahun 2005. Pembentukan TPIN ini didasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan No.88/KMK.02/2005 dan Gubernur Bank Indonesia No.7/9/KEP.GBI/2005. Hal ini menjadi landasan penting bagi pemerintah untuk mengendalikan inflasi yang menjadi salah satu tantangan utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Mengingat kontribusi inflasi daerah yang signifikan terhadap inflasi

nasional, yakni sebesar 77,51% pembentukan TPID (Tim Pengendalian Daerah) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota menjadi langkah berikutnya yang krusial untuk meminimalkan sumber-sumber gangguan inflasi di daerah.

Pembentukan TPID juga didukung oleh dasar hukum yang kuat, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang memberikan hak kepada daerah untuk mengelola dan menyejahterakan masyarakatnya, termasuk melalui pengendalian inflasi. Hal ini menunjukkan pentingnya peran daerah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat sebagai bagian dari otonomi daerah. Pada tahun 2017, pemerintah kembali memperkuat kerangka kebijakan ini melalui Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017, yang tidak hanya mengatur TPIN tetapi juga memberikan panduan lebih lanjut tentang pembentukan dan fungsi TPID di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Sebagai bagian dari upaya mengelola inflasi yang tinggi, Pemerintah Kota Provinsi Riau membentuk TPID Provinsi Riau pada 2 November 2022 melalui Keputusan Gubernur Nomor 1647/XI/2021. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap tingginya angka inflasi di Provinsi Riau yang mencapai 7,04% pada tahun 2022. TPID Provinsi Riau berfungsi sebagai wadah koordinasi lintas instansi yang bertujuan untuk menekan gangguan inflasi dan menjaga stabilitas harga di wilayah tersebut. Tim ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk instansi pemerintah daerah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Riau, serta pihak-pihak lain yang dianggap perlu.

Kerja sama lintas sektor yang dilakukan oleh TPID Provinsi Riau

merupakan implementasi nyata dari prinsip *Collaborative Governance*, yaitu strategi dalam ranah publik yang melibatkan para pemangku kepentingan dari berbagai sektor untuk bersama-sama merancang, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan atau program. *Collaborative Governance* tidak hanya mendorong sinergi antaraktor, tetapi juga memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan bersama, dengan mengintegrasikan sumber daya, pengetahuan, dan kapasitas masing-masing pihak.

Menurut UNDP (United Nations Development Programme), interaksi aktor dalam *Collaborative Governance* mencakup tiga domain utama, yaitu state (Negara/pemerintah), private sector (Sektor swasta/dunia usaha), dan society (masyarakat). Ketiga domain ini memiliki peran penting yang saling melengkapi. Pemerintah, dalam hal ini TPID, bertindak sebagai fasilitator utama yang menyediakan kerangka regulasi, kebijakan, dan koordinasi untuk mencapai tujuan pengendalian inflasi. Sektor swasta berkontribusi melalui peran dalam rantai pasok, produksi, dan distribusi komoditas, sementara masyarakat menjadi penerima manfaat sekaligus mitra yang mendukung keberlanjutan program melalui partisipasi aktif mereka.

Dalam konteks TPID Provinsi Riau, *Collaborative Governance* tercermin dalam keterlibatan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Riau, dunia usaha, serta organisasi masyarakat sipil. Sinergi ini diwujudkan melalui berbagai program strategis, seperti operasi pasar untuk menstabilkan harga komoditas, peningkatan infrastruktur distribusi barang, dan penguatan katahanan pangan lokal. Interaksi yang terjalin antara pemerintah, sektor swasta, dan

masyarakat tidak hanya mendorong efektivitas kebijakan, tetapi juga menciptakan rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga stabilitas harga di Provinsi Riau.

Namun, tantangan ada dalam implementasi *Collaborative Governance*. Misalnya, keterlibatan sektor swasta dan masyarakat terkadang belum optimal, terutama dalam hal keterlibatan langsung dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan dialog tatap muka dan pembanguan kepercayaan diantara para pemangku kepentingan. Selain itu, koordinasi yang lebih terstruktur antara TPID dan pihak-pihak terkait diperlukan untuk mengatasi hambatan logistik, infrastruktur, dan perbedaan prioritas antaraktor.

Dengan memperkuat interaksi dan komitmen diantara ketiga domain utama tersebut, *Collaborative Governance* dapat semakin efektif dalam mendukung upaya pengendalian inflasi di Provinsi Riau. Pendekatan ini tidak hanya menciptakan kebijakan yang inklusif dan adaptif, tetapi juga mendorong terciptanya kolaborasi yang berkelanjutan untuk memastikan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut (Afandi, 2022).

Berdasarkan fenomena diatas, adapun identifikasi masalah yang penulis temui adalah:

1. Menurut Badan Pusat Statistik, Angka inflasi di Provinsi Riau pada tahun 2022 mencapai 7,04% yang melonjak naik dibanding tahun 2018-2021, hal ini juga menjadikan Provinsi Riau sebagai salah satu provinsi yang menempati posisi ke-4 angka inflasi terbesar dari 5 provinsi di Indonesia tahun

2022.

2. Melalui Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor 1647/XI/2022, adanya kolaborasi yang tersusun dalam struktur Tim Pengendalian Inflasi Provinsi Riau guna mengendalikan inflasi di Provinsi Riau. Namun, beberapa aktor yang terlibat langsung bekerja sama tidak tercantum pada struktur tersebut, seperti sektor swasta dan kelompok tani.

bertujuan memberikan sumbangsih pengetahuan khususnya dalam bidang keilmuan Ilmu Pemerintah, tentang *Collaborative Governance* dalam pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Riau tahun 2022-2023

- b. Secara Praktis, penelitian ini memberikan manfaat sebagai pedoman dalam melihat *Collaborative Governance* dalam perannya guna melihat bagaimana pelaksanaan kolaboratif pengendalian inflasi Daerah Provinsi Riau tahun 2022-2023

Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka perumusan yang akan dibahas didalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam mengendalikan inflasi Daerah Provinsi Riau tahun 2022-2023?
2. Apa saja faktor-faktor pendukung *Collaborative Governance* dalam mengendalikan inflasi Daerah Provinsi Riau pada tahun 2022-2023?

Tujuan Dan Manfaat Penelitian

- a. Mengetahui pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam mengendalikan inflasi Daerah Provinsi Riau tahun 2022-2023
- b. Mengetahui faktor-faktor pendukung *Collaborative Governance* dalam mengendalikan inflasi Daerah Provinsi Riau tahun 2022-2023

Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis, penelitian ini

2. TINJAUAN TEORI

Collaborative Governance

Menurut UNDP *governance* adalah sebagai pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah bangsa. *Collaborative Governance* merupakan kegiatan tau strategi dalam ranah publik yang mempertemukan para pemangku kepentingan dari berbagai sektor untuk merancang dan melaksanakan suatu kebijakan atau program. *Collaborative Governance* berperan sebagai penengah agar para aktor dapat merumuskan kesepakatan yang sama terhadap suatu masalah (Hamka, 2022).

Menurut Ansell dan Gash (2007), *Collaborative Governance* adalah pendekatan yang dirancang secara sadar untuk mengatasi berbagai tantangan dalam tata kelola, yang mencakup kompleksitas hubungan antar institusi dan saling ketergantungan diantara mereka. Konsep ini menjadi penting karena munculnya konflik laten antara kelompok kepentingan yang sulit diselesaikan, serta perlunya mencari cara baru untuk mencapai legitimasi politik. Selain itu, kolaborasi sering kali diperlukan sebagai respons terhadap kegagalan implementasi kebijakan di lapangan dan ketidakmampuan kelompok

tertentu untuk memanfaatkan mekanisme institusi lain akibat keterbatasan rezim kekuasaan. Mobilisasi kelompok kepentingan, tingginya biaya, dan politisasi regulasi juga menjadi faktor yang mendorong perlunya kolaborasi. Dari berbagai alasan ini, disimpulkan bahwa kolaborasi muncul karena kompleksitas kepentingan dan kebutuhan untuk menyatukan berbagai aktor dalam sebuah mekanisme bersama, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan (Cahya, 2020)

Sebagai gambaran pengelompokan tersebut pada berbagai kebijakan, program, dan proyek pemerintah (publik) dapat kemukaan kelompok stakeholder seperti berikut:

1. Stakeholder Utama
Merupakan stakeholder yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program, dan proyek. Mereka harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan.
2. Stakeholder Pendukung
Merupakan stakeholder yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek, tetapi memiliki kepedulian dan keprihatinan sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah.
3. Stakeholder kunci
Merupakan stakeholders yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan. Stakeholder kunci yang dimaksud adalah unsur eksekutif sesuai levelnya, legislatif, dan instansi. Misalnya, stakeholder kunci untuk suatu keputusan proyek level daerah kabupaten

(Cahya, 2020).

Inflasi

Menurut para ahli, inflasi adalah kecenderungan meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam suatu perekonomian. Pengertian ini menekankan dua elemen utama, yaitu kenaikan harga secara umum dan bersifat terus-menerus. Kenaikan harga secara umum berarti inflasi tidak hanya terjadi pada satu atau dua jenis barang tertentu, melainkan pada sejumlah besar barang dan jasa yang menjadi komponen konsumsi masyarakat. Misalnya, kenaikan harga beras atau cabai merah saja belum dapat dikategorikan sebagai inflasi, karena tidak mencerminkan keseluruhan perubahan harga barang dalam perekonomian. Sementara itu, unsur terus-menerus menunjukkan bahwa inflasi bukanlah fenomena sesaat, seperti kenaikan harga karena faktor musiman atau peristiwa tertentu yang bersifat sementara, melainkan kenaikan harga yang berkelanjutan dan mengindikasikan adanya masalah mendalam dalam perekonomian. Menurut (Mankiw, 2014), inflasi harus dipahami sebagai peningkatan tingkat harga rata-rata yang mengurangi daya beli masyarakat secara sistemik. Hal ini menjadi penting karena inflasi dapat memengaruhi stabilitas ekonomi, distribusi pendapatan, dan daya saing suatu negara, sehingga memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan pelaku ekonomi untuk menjaga keseimbangannya (Astiyah, XXII).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dekriptif. Tempat yang dipilih sebagai lokasi penelitian sesuai dengan judul yakni di Provinsi Riau. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis

data berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam Mengendalikan Inflasi Daerah Provinsi Riau Tahun 2022-2023

Collaborative Governance adalah proses kolaborasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, untuk bekerja bersama mencapai tujuan bersama, khususnya dalam pengendalian inflasi di Provinsi Riau. Pendekatan ini memberikan solusi yang efektif dibandingkan jika hanya satu pihak yang bertindak, karena kolaborasi memungkinkan inovasi, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal. Menurut Ansell dan Gash, *Collaborative Governance* melibatkan pengaturan formal yang mendorong pengamvbilan keputusan kolektif melalui musyawarah dan konsesus dalam mengimplementasikan kebijakan publik.

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Riau, mengingat inflasi daerah yang mencapai 7,04% pada tahun 2022, menjadikannya salah satu dari lima provinsi penyumbang inflasi terbesar di Indonesia. Melalui model kolaborasi Ansell dan Gash, pelaksanaan *Collaborative Governance* di Riau melibatkan beberapa dimensi utama, yaitu kondisi awal (starting condition), kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan, dan proses kolaborasi. Proses kolaborasi meliputi dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, dan pemahaman bersama, yang saling

menopang satu sama lain. Model ini mencerminkan kebijakan dan program yang efektif untuk mengatasi tantangan inflasi.

Hasil dari *Collaborative Governance* di Provinsi Riau menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam mengenalkan inflasi. Hal ini diperkuat oleh pemaparan Asisten Direktur Divisi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah Bank Indonesia Provinsi Riau, Bapak Arnold Sitanggang, yang menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor dalam menciptakan kebijakan publik yang responsif dan berorientasi pada solusi kolektif. Pemaparan Asisten Direktur Divisi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah Bank Indonesia Provinsi Riau, Bapak Arnold Sitanggang, menjelaskan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Riau merupakan hasil kerja sama lintas sektor antara pemerintah Provinsi Riau, dan masyarakat, termasuk kelompok tani. Pemerintah Provinsi Riau berperan sebagai fasilitator alur koordinasi dengan diskusi antaraktor kepentingan yang melibatkan berbagai dinas terkait, badan usaha, dan sektor masyarakat.

Dalam praktiknya, jalur koordinasi ini diawali oleh Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai pembina dan pengarah, diikuti oleh Sekretaris Daerah sebagai ketua TPID, serta Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau sebagai wakil ketua. Sekretariat TPID dipegang oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan bersama Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Struktur ini memungkinkan koordinasi yang efektif antara pemerintah, dinas terkait, badan usaha, dan masyarakat, disesuaikan

dengan karakteristik perekonomian Riau. Dalam sektor pangan misalnya, Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura melakukan pengawasan, bimbingan, dan pembinaan terhadap kelompok tani untuk mengendalikan inflasi pangan, salah satu penyumbang terbesar inflasi di Riau. Dengan pola koordinasi yang terstruktur dan komunikasi yang baik, kolaborasi ini memastikan bahwa setiap pemangku kepentingan menjalankan tanggung jawabnya untuk mengendalikan inflasi secara optimal.

Pembentukan TPID Provinsi Riau didasarkan pada arahan pemerintah pusat melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 1219/V/2008 yang ditetapkan pada 7 Mei 2008 di Pekanbaru. TPID dibentuk sebagai respons terhadap kebutuhan kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi ketidakseimbangan kewenangan antaraktor dalam mengendalikan kebijakan moneter, tetapi tidak dapat menangani distribusi pasokan pangan, yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan. Kolaborasi ini melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat, untuk saling mendukung dalam tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Untuk memperkuat koordinasi antara tingkat pusat dan daerah, pada Juli 2011 dibentuk Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID. Pokjanas TPID, yang terdiri atas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan Bank Indonesia, bertujuan untuk memperkuat efektivitas peran TPID di daerah. Namun, meskipun TPI di tingkat pusat dan Pokjanas TPID TPID berkolaborasi dalam isu inflasi, mekanisme kerjasama antara keduanya belum diatur secara baku. Pada tahun 2017, dengan meningkatnya jumlah

TPID yang mencapai 527 tim, upaya penguatan kelembagaan menjadi prioritas, termasuk penguatan dasar hukum melalui Keputusan Presiden No.23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional. Keputusan ini menetapkan landasan hukum bagi TPIP di pusat, TPID di tingkat provinsi, dan TPID di tingkat Kabupaten/Kota.

Kepemimpinan fasilitatif merupakan elemen penting dalam *Collaborative Governance*, khususnya dalam pengendalian inflasi daerah di Provinsi Riau. Konsep ini menggarisbawahi perlunya kepemimpinan yang mampu mengelola proses kolaborasi secara efektif karena masing-masing pemangku kepentingan memiliki keterbatasan dalam menjalankan program secara mandiri. Ansell dan Gash (2008) mengidentifikasi tiga komponen utama yang harus dimiliki dalam kepemimpinan fasilitatif, yaitu;

- a. Manajemen Proses Kolaborasi: Memastikan bahwa semua aktor yang terlibat memiliki ruang untuk berinteraksi dan berkontribusi dalam kolaborasi dengan cara yang terorganisir.
- b. Kredibilitas Teknis: Mengelola kemampuan teknis setiap aktor untuk menjalankan tugasnya secara efisien, sehingga kolaborasi menghasilkan keputusan yang berbasis data dan fakta.
- c. Pemberdayaan Keputusan: Memastikan bahwa hasil kolaborasi berupa keputusan yang kredibel dan dapat dipercaya oleh semua pihak.

Dalam konteks pengendalian inflasi di Provinsi Riau tahun 2022-

2023, Kepemimpinan Fasilitatif mencakup dua jenis kepemimpinan, formal dan informal. Kepemimpinan formal melibatkan pejabat-pejabat tinggi, seperti Gubernur Riau, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Riau, Kepala Biro di Sekretariat Daerah, serta kepala dinas terkait. Mereka memiliki peran utama dalam memberikan arahan strategis dan menentukan kebijakan di tingkat makro. Selain itu, pimpinan badan usaha, seperti PT Pertamina Wilayah Riau dan PT Sarana Pembangunan Riau Trada, juga bergabung dalam struktur formal ini untuk memastikan koordinasi lintas sektor berjalan lancar.

Sementara itu, kepemimpinan informal berperan dalam mengelola dinamika kolaborasi di tingkat teknis dan operasional. Kepemimpinan informal tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antara berbagai aktor, tetapi juga mendorong terciptanya kepercayaan, komitmen, dan rasa tanggung jawab bersama dalam menjalankan tugas masing-masing. Peran informal ini sangat penting untuk menjaga kelancaran komunikasi dan menyelesaikan potensi konflik atau hambatan di lapangan.

Keseluruhan struktur kepemimpinan ini memastikan bahwa *Collaborative Governance* dalam pengendalian inflasi berjalan dengan baik, di mana setiap aktor dapat berkontribusi sesuai kapasitasnya untuk menghasilkan kebijakan yang kredibel dan efektif.

4.1.1 Proses Kolaborasi

Proses Collaborative merupakan elemen penting dalam memastikan kolaborasi lintas sektor berjalan secara efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam konteks pengendalian inflasi di Provinsi Riau

tahun 2022-2023, proses kolaborasi menjadi tahapan lanjutan setelah pembentukan TPID dan melibatkan serangkaian interaksi antaraktor. Menurut Ansell dan Gash, proses ini dimulai dengan dialog tatap muka yang berorientasi pada konsensus. Dialog ini bertujuan menciptakan ruang komunikasi terbuka di mana semua pihak dapat menyampaikan kepentingan, pandangan, dan solusi yang diusulkan.

Langkah awal ini bertujuan membangun kepercayaan antaraktor (*trust building*), yang merupakan pondasi utama untuk menjaga harmoni dalam kolaborasi. Kepercayaan memungkinkan setiap pihak merasa nyaman untuk berbagi tanggung jawab dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Setelah kepercayaan terjalin, aktor-aktor yang terlibat menunjukkan komitmen terhadap proses (*commitment to process*), yaitu kesiapan untuk mengikuti tahapan kolaborasi secara konsisten hingga tujuan tercapai. Dalam tahap ini, semua pihak harus menjalankan perannya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Tahap akhir adalah membangun pemahaman bersama (*shared understanding*) yaitu menciptakan kesepakatan terhadap isu yang dihadapi, strategi yang akan diambil, dan tujuan yang hendak dicapai. Pemahaman bersama ini penting untuk memastikan semua pihak bergerak ke arah yang sama dan menyelesaikan permasalahan dengan solusi yang disepakati. Dalam konteks TPID Provinsi Riau, keberhasilan proses kolaborasi ini memungkinkan tim untuk merumuskan kebijakan dan langkah strategis yang efektif dalam mengendalikan inflasi di daerah. Proses ini menjadi penentu utama apakah kolaborasi berjalan optimal

atau sebaliknya, tergantung pada kualitas interaksi dan koordinasi antaraktor.

4.2 Hasil *Collaborative Governance*

Penerapan *Collaborative Governance* dalam pengendalian inflasi daerah di Provinsi Riau tahun 2022–2023 telah berjalan dengan baik. Keberhasilan ini terlihat dari berbagai indikator yang mendukung, salah satunya adalah kondisi awal pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), yang dibentuk berdasarkan arahan pusat dengan tujuan utama menjaga stabilitas inflasi sebagai kepentingan publik. Struktur keanggotaan TPID Provinsi Riau disusun secara adaptif, disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan perekonomian daerah, sehingga memungkinkan setiap wilayah memberikan kontribusi sesuai perannya dalam pengendalian inflasi.

Selain itu, pembaruan struktur TPID yang dilakukan secara berkala melalui Surat Keputusan Gubernur menunjukkan adanya komitmen yang kuat dalam memastikan efektivitas tim ini. Kebijakan ini tidak hanya mencerminkan fleksibilitas dalam menyesuaikan kebutuhan operasional, tetapi juga menjadi landasan hukum yang memperkuat koordinasi antaraktor. Dengan struktur keanggotaan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, Bank Indonesia, badan usaha, dan masyarakat, TPID Provinsi Riau mampu memadukan beragam sumber daya, keahlian, dan kewenangan untuk merumuskan kebijakan yang komprehensif.

Keberhasilan *Collaborative Governance* di Provinsi Riau juga didukung oleh implementasi yang responsif terhadap tantangan inflasi,

seperti lonjakan harga bahan pokok pada tahun 2022. Melalui perencanaan yang matang, pembaruan struktur kelembagaan, dan kolaborasi lintas sektor, TPID mampu merespons permasalahan inflasi dengan kebijakan yang terkoordinasi dan berbasis kebutuhan lokal. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan inflasi yang berlandaskan prinsip *Collaborative Governance* dapat menciptakan solusi yang lebih inklusif, efektif, dan berkelanjutan dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

4.2.1 Kepemimpinan Fasilitatif

Dalam indikator kepemimpinan fasilitatif, keberadaan unsur kepemimpinan yang menjadi penghubung antara para pemangku kepentingan (stakeholders) telah memainkan peran penting dalam mengarahkan pengendalian inflasi di Provinsi Riau. Struktur kepemimpinan ini melibatkan Gubernur Riau sebagai Ketua, Sekretaris Daerah Provinsi Riau sebagai Ketua Pelaksana, dan Bank Indonesia Provinsi Riau sebagai Wakil Ketua dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Riau. Dengan peran strategis masing-masing, unsur-unsur kepemimpinan ini tidak hanya menjadi jembatan koordinasi, tetapi juga memastikan bahwa setiap aktor memiliki peran yang terarah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pengendalian inflasi.

Gubernur Riau sebagai Ketua memegang tanggung jawab utama dalam memberikan arahan kebijakan dan memastikan bahwa upaya pengendalian inflasi sejalan dengan kebutuhan daerah. Sementara itu, Sekretaris Daerah bertugas sebagai Ketua Pelaksana yang mengoordinasikan operasional TPID di tingkat teknis, memastikan bahwa program-program yang dirancang

berjalan secara efektif. Bank Indonesia, sebagai Wakil Ketua, berperan memberikan dukungan teknis dan data ekonomi untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis fakta. Sinergi antara unsur-unsur ini menjadikan proses pengendalian inflasi di Provinsi Riau lebih terorganisir dan efisien.

Kepemimpinan fasilitatif juga mencakup peran sebagai fasilitator dialog antaraktor, yang menciptakan ruang komunikasi terbuka untuk membahas dan menyelesaikan isu-isu strategis terkait inflasi. Peran ini mencakup tanggung jawab untuk menggerakkan, memfasilitasi, dan menjadi inisiator dalam menemukan solusi atas permasalahan inflasi. Dalam hal ini, Gubernur Riau, Sekretaris Daerah, dan Bank Indonesia Provinsi Riau berhasil menciptakan koordinasi yang efektif di antara para pemangku kepentingan, memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi berbagai pihak. Dengan struktur kepemimpinan yang kuat dan terarah, TPID Provinsi Riau mampu menjalankan tugasnya dengan baik dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui pengendalian inflasi yang berkelanjutan.

4.2.2 Desain Kelembagaan

Pada indikator desain kelembagaan, keberadaan regulasi yang mengatur dan mengikat setiap pemangku kepentingan dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Riau telah memberikan kerangka kerja yang jelas dan arah yang konsisten. Regulasi ini memastikan bahwa setiap stakeholder menjalankan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) mereka secara terkoordinasi dan sesuai dengan peran masing-masing. Dengan adanya aturan yang

disusun secara sistematis, proses pengendalian inflasi di Provinsi Riau dapat berjalan lebih terstruktur dan terarah, menciptakan sinergi yang efektif antaraktor.

Namun, meskipun desain kelembagaan TPID telah menunjukkan efektivitasnya, terdapat kekurangan dalam hal pencantuman aktor masyarakat, seperti kelompok tani, dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang TPID Provinsi Riau. Kelompok tani, yang berkolaborasi melalui Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau, memainkan peran strategis dalam pengendalian inflasi, khususnya di sektor pangan yang menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar. Meskipun kelompok tani aktif dilibatkan dalam kegiatan TPID dan sering berkomunikasi melalui dinas terkait, absennya pencantuman mereka dalam struktur resmi keanggotaan TPID dapat menimbulkan kesenjangan dalam legitimasi dan representasi formal.

Pencantuman kelompok tani dalam SK Gubernur tentang TPID tidak hanya akan memperjelas peran mereka tetapi juga memberikan pengakuan resmi sebagai bagian dari upaya kolaboratif pengendalian inflasi. Langkah ini dapat memperkuat hubungan antara TPID dan kelompok tani, sehingga meningkatkan efektivitas koordinasi, akuntabilitas, dan komitmen dalam implementasi program-program strategis. Dengan melibatkan semua aktor secara formal, desain kelembagaan TPID dapat menjadi lebih inklusif dan adaptif, mendukung pengendalian inflasi yang berkelanjutan di Provinsi Riau.

4.2.3 Proses Kolaborasi

Pada indikator proses kolaborasi,

yang mencakup berbagai sub-indikator, TPID Provinsi Riau tahun 2022–2023 telah menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam menjaga koordinasi dan sinergi antaraktor. Salah satu sub-indikator utama adalah dialog tatap muka, yang terlaksana dengan baik melalui komunikasi intensif dan rapat berkala antar pemangku kepentingan. Dialog ini dilakukan sesuai dengan tatanan dan level pertemuan yang disesuaikan dengan tujuan dan fungsi masing-masing rapat, seperti High-Level Meeting, rapat teknis, dan koordinasi mingguan. Setiap pertemuan berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi, mendiskusikan isu strategis, serta mengevaluasi kebijakan yang telah diimplementasikan. Struktur dialog yang terorganisir ini mencerminkan komitmen TPID untuk menciptakan komunikasi yang efektif dan berorientasi pada solusi dalam pengendalian inflasi.

Pada sub-indikator pemahaman bersama, TPID Provinsi Riau juga telah melakukan upaya yang signifikan melalui pelaksanaan Capacity Building pada tahun 2022–2023. Forum ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman terhadap sumber daya yang ada, termasuk keahlian teknis dan strategi pengelolaan inflasi yang relevan. Capacity Building memberikan ruang bagi anggota TPID untuk mendalami peran dan tanggung jawab masing-masing, memahami dinamika inflasi di Provinsi Riau, serta memperkuat kemampuan mereka dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan secara kolaboratif. Kegiatan ini tidak hanya menciptakan pemahaman bersama tetapi juga meningkatkan kualitas kerja tim dalam merespons tantangan inflasi yang kompleks.

Secara keseluruhan, proses

kolaborasi di TPID Provinsi Riau berjalan dengan baik, didukung oleh komunikasi yang intensif dan pembentukan pemahaman bersama melalui kegiatan yang terarah. Dengan pendekatan ini, TPID mampu menciptakan sinergi yang kuat, mengoptimalkan koordinasi antaraktor, dan menghasilkan kebijakan pengendalian inflasi yang lebih efektif dan adaptif terhadap kondisi daerah. Hal ini menunjukkan pentingnya proses kolaborasi yang terstruktur dalam menjaga keberhasilan *Collaborative Governance* di tingkat daerah.

Selama proses kolaborasi yang dilakukan TPID Provinsi Riau pada tahun 2022–2023, salah satu pencapaian signifikan yang berhasil diwujudkan adalah implementasi program Demplot Digital Farming berbasis Internet of Things (IoT). Program ini diterapkan untuk pertama kalinya di lahan Kelompok Tani Jaring Mas Sejahtera, Desa Pulau Birandang, Kabupaten Kampar, sebagai upaya mendukung pengembangan teknologi pertanian digital di Riau, khususnya dalam budidaya cabai. Program ini diluncurkan pada September 2022 sebagai bagian dari inisiatif Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi produksi pangan dan mendukung stabilitas harga komoditas strategis seperti cabai, yang merupakan salah satu penyumbang utama inflasi pangan.

Keberhasilan program ini ditandai dengan panen perdana yang dilaksanakan pada 27 Februari 2023, di mana hasilnya menunjukkan potensi yang sangat menjanjikan. Setiap batang pohon cabai di demplot ini mampu menghasilkan 1 kilogram cabai atau lebih, dengan total area tanam sebesar 0,7 hektar yang

mencakup 8.000 batang pohon cabai. Dengan potensi produksi sebesar 8 ton cabai merah, program ini tidak hanya memberikan solusi nyata terhadap tantangan inflasi pangan tetapi juga menunjukkan bagaimana teknologi digital dapat diintegrasikan dalam sektor pertanian untuk meningkatkan hasil panen secara signifikan.

Selain itu, program ini memberikan dampak positif tidak hanya dari segi kuantitas hasil panen tetapi juga dari segi efisiensi dan keberlanjutan. Teknologi IoT memungkinkan pemantauan kondisi tanaman secara real-time, seperti kelembapan tanah, suhu, dan kebutuhan nutrisi, sehingga pengelolaan lahan menjadi lebih optimal. Program ini juga memberikan pelatihan kepada kelompok tani, meningkatkan keterampilan mereka dalam menggunakan teknologi modern dan mengelola hasil pertanian secara lebih profesional.

Keberhasilan panen perdana Demplot Digital Farming Komoditas Cabai Merah menjadi salah satu pencapaian signifikan yang diraih oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Riau pada tahun 2023. Pencapaian ini menjadi lebih istimewa mengingat Provinsi Riau bukanlah wilayah yang dikenal sebagai daerah penghasil pangan. Namun, melalui penerapan teknologi pertanian modern berbasis Internet of Things (IoT) dan pendekatan *Collaborative Governance*, TPID Provinsi Riau berhasil menunjukkan bahwa dengan inovasi dan kolaborasi yang tepat, daerah non-penghasil pangan pun dapat berkontribusi dalam mengatasi inflasi pangan.

Sebagai respons terhadap keberhasilan ini, TPID Provinsi Riau terus berupaya mengembangkan

kegiatan serupa di berbagai daerah di provinsi tersebut. Program ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap komoditas strategis seperti cabai merah, sehingga tidak hanya menekan harga tetapi juga memperkuat ketahanan pangan lokal. Selain itu, program ini juga menjadi model untuk pengelolaan inflasi yang berkelanjutan dengan melibatkan teknologi dan kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, kelompok tani, dan sektor swasta.

Hasil nyata dari berbagai upaya yang dilakukan TPID Provinsi Riau terlihat dari penurunan signifikan angka inflasi. Pada Juli 2022, inflasi tercatat sebesar 7,04% (YoY), yang merupakan salah satu angka tertinggi di Indonesia. Namun, pada Juli 2023, TPID berhasil menurunkan inflasi menjadi 1,96% (YoY). Penurunan ini mencerminkan keberhasilan implementasi kebijakan yang berbasis kolaborasi, inovasi, dan pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan daerah.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil TPID Provinsi Riau dalam pengendalian inflasi telah berjalan efektif, terutama melalui sinergi antaraktor dan pemanfaatan teknologi dalam program strategis. Pencapaian ini tidak hanya menjadi bukti efektivitas *Collaborative Governance*, tetapi juga memberikan inspirasi bagi daerah lain untuk mengadopsi pendekatan serupa dalam menghadapi tantangan inflasi dan ketahanan pangan. Dengan komitmen yang terus berlanjut, TPID Provinsi Riau memiliki potensi besar untuk mempertahankan stabilitas ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

4.3 Faktor-Faktor Pendukung Collaborative Governance dalam Mengendalikan Inflasi Daerah Provinsi Riau Tahun 2022-2023

Dalam mengendalikan inflasi daerah Provinsi Riau pada tahun 2022-2023, adapun faktor-faktor pendukung *Collaborative Governance* Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Riau. Faktor pendukung merupakan suatu hal yang menjadi dorongan agar kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Adapun faktor-faktor pendukung yaitu sebagai berikut:

4.3.1 Kepemimpinan Yang Kuat

Kepemimpinan yang kuat menjadi salah satu elemen kunci dalam keberhasilan pengendalian inflasi di Provinsi Riau. Dalam konteks ini, Gubernur Riau, selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), memainkan peran sentral dalam memberikan arahan strategis, menetapkan visi dan misi yang jelas, serta memotivasi anggota tim untuk bekerja secara efektif. Kepemimpinan yang kuat tidak hanya memastikan koordinasi berjalan lancar, tetapi juga menjaga agar semua pihak tetap fokus pada tujuan bersama, yaitu menekan angka inflasi secara signifikan.

Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Delfa Agustia, ST, Asisten Manajer Fungsi Data Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah Bank Indonesia Provinsi Riau, kepemimpinan yang kuat sangat dibutuhkan dalam pengelolaan tim. Ia menekankan bahwa pemimpin yang memiliki kemampuan untuk memotivasi dan mengarahkan tim dapat memastikan anggota TPID bekerja secara konsisten dan terarah.

Selain itu, Gubernur Riau juga didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten di dalam TPID, di mana anggota tim memiliki pemahaman yang baik tentang ekonomi dan inflasi, sehingga mempermudah implementasi kebijakan.

Sosok kepemimpinan yang kuat ini tidak hanya mencakup kemampuan teknis dan manajerial, tetapi juga kemampuan untuk membangun kepercayaan dan mendorong kolaborasi antaraktor dalam TPID. Sebagai contoh, Gubernur Riau secara aktif memimpin rapat strategis, seperti High-Level Meeting, serta memastikan setiap keputusan yang diambil didasarkan pada data yang akurat dan kebutuhan daerah. Kepemimpinan ini juga menjadi katalisator dalam menyatukan berbagai kepentingan lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, Bank Indonesia, badan usaha, dan masyarakat, untuk bekerja sama menghadapi tantangan inflasi.

Dari sudut pandang *Collaborative Governance*, peran Gubernur sebagai pemimpin TPID mencerminkan pentingnya kepemimpinan fasilitatif, di mana pemimpin tidak hanya mengarahkan tetapi juga memfasilitasi proses kolaborasi yang inklusif. Dengan kepemimpinan yang kuat, TPID Provinsi Riau mampu mengoordinasikan berbagai program strategis yang tidak hanya menekan inflasi dari 7,04% pada 2022 menjadi 1,96% pada 2023, tetapi juga menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif merupakan pondasi penting dalam pengelolaan inflasi di tingkat daerah.

4.3.2 Koordinasi yang Efektif

Koordinasi yang efektif merupakan salah satu kunci keberhasilan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Riau dalam mengendalikan inflasi selama tahun 2022–2023. Koordinasi ini merujuk pada proses di mana setiap anggota tim memahami peran, tanggung jawab, dan tujuan yang ingin dicapai. Proses ini melibatkan komunikasi yang terbuka dan langsung, sehingga informasi dapat disampaikan dengan akurat tanpa menimbulkan kesalahpahaman. Melalui koordinasi yang terstruktur, setiap pihak dapat bekerja sama secara efisien, meminimalkan kesalahan, dan mempercepat pencapaian tujuan bersama, khususnya dalam mengatasi lonjakan inflasi yang terjadi pada tahun 2022.

Dialog tatap muka menjadi salah satu bentuk implementasi koordinasi yang efektif. TPID Provinsi Riau secara rutin menyelenggarakan berbagai jenis pertemuan, seperti rapat mingguan, High-Level Meeting (HLM), dan rapat koordinasi teknis, yang disesuaikan dengan kebutuhan pembahasan. Pertemuan ini tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi tetapi juga sebagai forum untuk mengevaluasi kinerja, merumuskan kebijakan, dan menyelesaikan kendala yang muncul dalam pelaksanaan program. Komitmen setiap aktor untuk terlibat aktif dalam dialog ini menjadi bukti nyata bahwa koordinasi yang terjalin telah berjalan dengan baik.

Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Delfa Agustia, ST, Asisten Manajer Fungsi Data Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah Bank Indonesia Provinsi Riau, TPID Provinsi Riau sangat berupaya menjaga komunikasi yang efektif di antara para anggotanya. Komunikasi ini tidak hanya melibatkan diskusi

formal tetapi juga pertukaran informasi yang responsif dan real-time, yang membantu tim dalam mengambil keputusan strategis. Selain itu, koordinasi yang efektif juga mencakup penetapan langkah-langkah yang perlu diambil, pembagian tugas yang jelas, dan batas waktu yang terstruktur untuk setiap program, sehingga memudahkan pelaksanaan kebijakan secara efisien.

Koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dinas terkait, dan badan usaha, yang terjalin dalam TPID Provinsi Riau, menciptakan sinergi yang kuat untuk mengatasi tantangan inflasi. Hasilnya, TPID mampu menjalankan program-program strategis, seperti penguatan distribusi pangan dan operasi pasar, yang berdampak langsung pada stabilisasi harga komoditas. Dengan koordinasi yang efektif, TPID Provinsi Riau berhasil menurunkan angka inflasi dari 7,04% pada 2022 menjadi 1,96% pada 2023, menunjukkan pentingnya peran komunikasi dan sinergi dalam mendukung keberhasilan *Collaborative Governance* di tingkat daerah.

4.3.3 Data dan Informasi yang Jelas

Dalam pengendalian inflasi, ketersediaan data dan informasi yang akurat serta real-time merupakan salah satu elemen kunci untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Data ini mencakup informasi mengenai harga barang dan jasa, indeks inflasi, kondisi pasar, dan faktor ekonomi lainnya yang relevan. Dengan informasi yang akurat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Riau dapat menganalisis tren inflasi, mengidentifikasi sektor-sektor yang terdampak, serta memahami penyebab kenaikan harga secara lebih komprehensif.

Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Wening Tresnaning Asih, Ekonom Senior Bank Indonesia Provinsi Riau, informasi real-time sangat membantu TPID dalam merumuskan kebijakan yang responsif. Misalnya, ketika data menunjukkan lonjakan harga pada komoditas tertentu, TPID dapat segera melakukan langkah preventif, seperti intervensi harga atau program stabilisasi, untuk mengatasi dampaknya sebelum meluas. Data ini diperoleh dari berbagai sumber, termasuk pemantauan harian melalui media massa dan laporan statistik resmi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap awal bulan.

Keberadaan data yang transparan dan terkini juga memungkinkan TPID untuk mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Dengan memahami dinamika pasar secara real-time, TPID dapat menyusun strategi yang tepat untuk menjaga stabilitas harga dan mencegah lonjakan inflasi. Contohnya, ketika data menunjukkan kenaikan harga bahan pokok seperti cabai merah atau bawang merah, TPID dapat segera meningkatkan distribusi pasokan, mengadakan operasi pasar, atau melakukan komunikasi dengan produsen untuk menstabilkan harga.

Lebih lanjut, data yang akurat tidak hanya berguna dalam penanganan jangka pendek, tetapi juga dalam perencanaan jangka panjang. Dengan analisis data yang mendalam, TPID dapat mengidentifikasi pola-pola inflasi musiman dan mengembangkan kebijakan preventif untuk meminimalkan risiko inflasi di masa mendatang. Hal ini menciptakan landasan yang kuat bagi pengelolaan inflasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Melalui pemanfaatan data dan informasi yang optimal, TPID Provinsi Riau tidak hanya berhasil merumuskan kebijakan yang lebih responsif, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi daerah. Dengan dukungan data yang akurat, TPID mampu menurunkan angka inflasi dari 7,04% pada 2022 menjadi 1,96% pada 2023, menunjukkan bahwa informasi yang jelas dan real-time adalah fondasi penting dalam keberhasilan *Collaborative Governance* di Provinsi Riau.

4.3.4 Kondisi Ekonomi Makro

Kondisi ekonomi makro memainkan peran penting dalam pengendalian inflasi di tingkat daerah, karena fluktuasi pada tingkat nasional dan perubahan pasar global memiliki dampak yang signifikan terhadap harga barang dan jasa di suatu wilayah. Kondisi ekonomi nasional, seperti pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran, dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, yang pada gilirannya akan berdampak pada permintaan barang dan jasa. Peningkatan permintaan ini seringkali mendorong kenaikan harga, yang dapat menyebabkan inflasi. Selain itu, perubahan pasar global, terutama fluktuasi harga komoditas internasional, juga memengaruhi inflasi lokal. Misalnya, kenaikan harga minyak atau bahan pangan di pasar internasional dapat menyebabkan biaya produksi barang di dalam negeri meningkat, yang kemudian akan mendorong harga barang di pasar domestik untuk naik. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi makro, baik di tingkat domestik maupun global, saling terkait dan mempengaruhi tingkat inflasi di suatu daerah.

Sebagaimana diungkapkan oleh

Ibu Wening Tresnaning Asih, Ekonom Senior Bank Indonesia Provinsi Riau, faktor-faktor ini memiliki pengaruh yang kuat terhadap inflasi di Provinsi Riau. Jika perekonomian suatu negara tumbuh pesat, permintaan atas barang dan jasa juga meningkat, yang pada gilirannya dapat mendorong harga naik. Selain itu, perubahan harga barang-barang penting di pasar global, seperti bahan bakar dan pangan, turut berkontribusi terhadap kenaikan biaya produksi dalam negeri, yang dapat memperburuk inflasi lokal. Oleh karena itu, stabilitas ekonomi makro menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhitungkan dalam mengendalikan inflasi di daerah.

Menurut Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi Riau pada tahun 2023 diperkirakan tetap tumbuh positif, melanjutkan tren pemulihan yang dimulai pada tahun sebelumnya, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 3,9% hingga 4,7% (YoY). Meskipun ekonomi Riau mengalami pemulihan, faktor eksternal seperti fluktuasi harga komoditas global tetap menjadi tantangan dalam mengendalikan inflasi. Oleh karena itu, Kondisi Ekonomi Makro dan perubahan pasar global tidak dapat dipisahkan dalam upaya pengendalian inflasi, karena keduanya saling mempengaruhi harga-harga komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi, seperti pangan dan energi.

Keberhasilan pengendalian inflasi di Provinsi Riau juga dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung dalam *Collaborative Governance* yang melibatkan kepemimpinan yang kuat, koordinasi yang efektif, serta data dan informasi yang jelas. Melalui koordinasi yang baik antara pemangku kepentingan dan respons yang cepat terhadap perubahan

kondisi ekonomi makro dan global, TPID Provinsi Riau berhasil menurunkan angka inflasi yang sebelumnya sangat tinggi pada tahun 2022, yakni 7,04%, menjadi 1,96% pada tahun 2023. Pencapaian ini membuktikan bahwa meskipun faktor ekonomi makro dan perubahan pasar global memiliki dampak signifikan, sinergi antara berbagai faktor pendukung dalam *Collaborative Governance* dapat mengatasi tantangan tersebut dan menjaga stabilitas ekonomi daerah secara berkelanjutan.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan dan hasil deskripsi dari pengerjaan penelitian yang sudah dilakukan, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa *Collaborative Governance* dalam pengendalian inflasi di Provinsi Riau tahun 2022 – 2023 berhasil, hal ini dapat dilihat melalui hasil *Collaborative Governance* yakni angka inflasi Provinsi Riau yang turun menjadi 1,96%. Keberhasilan *Collaborative Governance* tersebut dapat dilihat dari kondisi awal merupakan latar belakang terjadinya kolaborasi antar aktor. Selanjutnya adalah kepemimpinan fasilitatif dimana setiap aktor dalam penendalian inflasi di Provinsi Riau sudah menjalankan kepemimpinan fasilitatif secara baik. Kemudian desain kelembagaan yang terkait dengan kejelasan aturan, mekanisme, dan prosedur dalam dilakukannya *Collaborative Governance*, adapun aturan untuk tingkat daerah Provinsi Riau mengacu pada melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor 1647/XI/2022 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Riau. Namun, terkait desain kelembagaan, tidak dicantumkannya aktor swasta dan

actor masyarakat yang berperan langsung dalam mengendalikan inflasi di Provinsi Riau. Proses kolaborasi yang dilakukan dalam bentuk dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, dan pemahaman bersama sudah optimal.

Keberhasilan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Riau dalam mengendalikan inflasi di Provinsi Riau tahun 2022 – 2023 tentu didorong oleh faktor pendukung. Adapun faktor pendukung keberhasilan tersebut antara lain kepemimpinan yang kuat, koordinasi yang efektif, serta data dan informasi yang jelas, serta kondisi ekonomi makro dan perubahan pasar global.

5.2 Saran

Adapun saran yang bisa peneliti berikan dalam penelitian tentang *Collaborative Governance* dalam Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Riau tahun 2022-2023 adalah :

1. Pada indikator desain kelembagaan, perlu dicantumkan aktor swasta serta masyarakat yang berperan, yakni Kelompok Tani dan Pihak Swasta kedalam SK Gubernur tentang TPID Provinsi Riau guna memperjelas dan sebagai wadah kolaborasi dengan Kelompok Tani tersebut. Hal ini akan memperjelas peran serta mereka dan memperkuat kolaborasi dalam mengatasi masalah inflasi dan tidak menjadikan ketimpangan antara satu aktor yang dominan berperan, yakni aktor pemerintah.
2. TPID Provinsi Riau perlu

terus mengembangkan program-program baru yang inovatif dalam pengendalian inflasi. Hal ini penting untuk menjaga keefektifan dan relevansi strategi mereka dalam menghadapi tantangan ekonomi yang terus berkembang. Inovasi program dapat mencakup penggunaan teknologi baru dalam pemantauan harga dan pasokan, pendekatan baru dalam pendidikan dan dukungan kepada petani, serta strategi komunikasi yang lebih efektif untuk melibatkan lebih banyak pihak dalam proses pengambilan keputusan. Dengan berinovasi secara terus-menerus, TPID Provinsi Riau dapat meningkatkan kemampuannya dalam mengelola dan mengendalikan inflasi secara efektif, sesuai dengan tuntutan zaman dan kondisi ekonomi yang dinamis.

3. TPID Provinsi Riau harus tetap aktif dan proaktif dalam menghadapi factor penghambat eksternal seperti hambatan distribusi, dinamika geopolitik, dan dampak cuaca ekstrem. Pertama, dalam mengatasi hambatan distribusi, TPID Provinsi Riau harus menekankan kerjasama lebih lagi melalui Dinas Perhubungan Provinsi Riau untuk memperbaiki infrastruktur jalan dan transportasi guna memastikan pasokan barang dan bahan pangan lancar dan efisien ke seluruh wilayah

Provinsi Riau. Kedua, terkait dengan dinamika geopolitik, TPID Provinsi Riau perlu memantau dengan cermat perubahan politik dan ekonomi global yang dapat berdampak langsung terhadap inflasi di daerah. Ini memungkinkan TPID untuk merancang strategi respons yang tepat waktu dan adaptif. Ketiga, menghadapi cuaca ekstrem seperti kekeringan atau banjir, TPID harus mempersiapkan rencana mitigasi risiko yang komprehensif, termasuk penggunaan teknologi untuk pemantauan dan peringatan dini, serta mendukung lebih lagi petani dengan teknik pertanian yang sesuai dengan kondisi cuaca yang berfluktuasi. Dengan upaya ini, TPID Provinsi Riau dapat meningkatkan ketahanan terhadap faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi stabilitas harga dan inflasi di wilayah Provinsi Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan E-Book

- Ahyar, H, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (CV . Pustaka Ilmu Group, 2020)
- Astiyah, Suseno dan Siti, *Seri Kebanksentralan No. 22 - Inflasi, Bank Indonesia*, 2010, XXII
- Astuti, Retno Sunu, Hardi Warsono, and Abd. Rachim, *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik*, ed. by Tim DAP Press, 1st edn (Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2020) [https://doc-pak.undip.ac.id/id/eprint/1143/1/c](https://doc-pak.undip.ac.id/id/eprint/1143/1/collaborative_gov_(revisi)_5_7_20-converted-.pdf)
- Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 38th edn (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018)
- Martomo, Yitno Puguh, *Collaborative Governance Sebagai Basis Pengelolaan Public Affairs*, 1st edn (Surakarta: Yuma Pustaka, 2017)
- Nur Afandi, M.T, M.P.S Sri Sudartini, M.I.Pol Alikha Novira, S.Hum., and M.Sc. Endah Tri Anomsari, S.Sos., *Collaborative Governance : Suatu Tinjauan Konseptual Model Collaborative Governance*, 1st edn (Jakarta: Deepublish, 2022)
- Noor, Muhammad, Falih Suaedi, and Antun Mardiyanta, *Collaborative Governance (Suatu Tinjauan Teoritis Dan Praktik)*, Edisi Pert (Yogyakarta: Bildung, 2022)
- Nursapiah, *Penelitian Kualitatif* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020)
- Ode Syaiful Islamy H, *Collaborative Governance Konsep Dan Aplikasi* (Jakarta: Deepublish, 2020) <https://ebooks.gramedia.com/id/buku/collaborative-governance-konsep-dan-aplikasi>
- Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif Dan Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2020)
- Sartono, W. Sigit Pudjianto, and Doddy Zulverdi, *Buku Petunjuk TPID*, ed. By Tim Pelaksana Kelompok Kerja Nasional TPID (Jakarta, 2014)
- Simorangkir, Iskandar, *Satu Dekade Pengendalian Inflasi*, 1st edn (Jakarta: Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat, 2018)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV ALFABETA, 2017) [http://repository.iainkudus.ac.id/5258/6/6. BAB III.pdf](http://repository.iainkudus.ac.id/5258/6/6.BAB%20III.pdf)

Suparmono, M.Si., *Pengantar Ekonomi Makro*, 2nd edn (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018) http://repository.stimykp.ac.id/246/1/6.Buku_Pengantar_Ekonomi_Makro.pdf

Utari, G.A Diah, Retni Cristina S., and Sudiro Pambudi, *Inflasi Di Indonesia: Karakteristik Dan Pengendaliannya*, 23rd edn (Jakarta: Bank Indonesia Institute, 2015) http://lib.ibs.ac.id/materi/BI_Corner/Terbitan/BI/SeriKebanksentralan/BSK-23-Inflasi-di-Indonesia.pdf

Jurnal

Adelia Putri, and Ryan Juminta Anward, 'Efek Ambang Batas Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 6 (2023)

Dimas Luqito, 'Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kabupaten Sidoarjo)', *Jurnal Fisip Unair*, 2016

Gulo, Abid Fikasi, 'Pola Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Dalam Pengendalian Inflasi Di Kota Padang Tahun 2015' (Universitas Andalas, 2018)

Hamka, Yussi Nadia, Heli Supardi, Fajrin Namora, And Fiska Devi Jiasti, 'Collaborative Governance Model Dalam Membangun Sustainable Integrated Ecotourism Di Lmdh Puncak Lestari Cisarua Kabupaten Bogor', *Jurnal Sumber Daya Aparatur*, 4 (2022)

Izwar Rafiq, Muh, Badaruddin, and Reynilda, 'Pengaruh Komunikasi, Insentif Daerah Dan Kerjasama Tim Terhadap Kinerja Anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Pada Sekretariat Daerah

Kabupaten Majene Tahun 2022', *Jurnal Pelopor Manajemen Indonesia*, 2 (2) (2022), 140–52

Nur Cahya, 'Proses Collaborative Dalam Penerapan Uang Elektronik (UNIK) Di Jalan Tol Kota Makassar' (Universitas Muhammadiyah Makassar)

Nurhasanaton, and Bustami Usman, 'Analisis Peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Banda Aceh Dalam Pengendalian Inflasi', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip USK*, 8 (2023)

Ramayani, Atin, Jambur Poti, and Ramadhani Setiawan, 'Analisis Kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah Dalam Mengendalikan Inflasi Dikota Tanjungpinang Tahun 2019', *Universitas Maritim Raja Ali Haji*, 1 (2020)

Silviani, Revika, and Fitri Eriyanti, 'Faktor Pendukung Dan Penghambat Collaborative Governance Dalam Pelaksanaan Program Air Bersih Di Negeri Thuk Amplu Inderapura', *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 04 (2023)

Soni Fajar Mahmud, 'Analisis Peranan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Terhadap Perekonomian Dumai', *Jurnal Unitex*, 11 (2018)

Suardi Achmad, 'Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengendalikan Inflasi Di Kabupaten Takalar' (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021)

Winda Romaboida Situmorang, 'Media Sosial Instagram Sebagai Bentuk Valdiasi Dan Representasi Diri', *Sosiologi Nusantara*, 9.1 (2023)

Peraturan dan Perundang-Undangan

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun

2017 Tentang Mekanisme dan Tata Kerja TPIP, TPID Provinsi, dan TPID Kabupaten/Kota.

3. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional

4. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 148 Tahun 2017 Tentang Tugas dan Keanggotaan Kelompok Kerja dan Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 Tentang Aturan Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1696/SJ/2013 Tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah

7. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Nomor 88/KMK.02/2005 Tentang Pembentukan Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Nasional

8. Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 7/9/KEP.GBI/2005 Tentang Pembentukan Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Nasional

9. Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor 1219/V/2008 Tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Riau

10. Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor 1340/XI/2010 Tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Riau

11. Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor 381/V/2014 Tentang Perubahan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Riau